



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN PIMPINAN KOMISI DAN PIMPINAN PANSUS DPR RI
DALAM RANGKA EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016
DAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017**

TANGGAL 29 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Selasa, 29 November 2016.
P u k u l	: 14.30 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membicarakan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 36 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota. - Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI; - Pimpinan Pansus

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada pimpinan komisi dan pimpinan Pansus untuk menyampaikan pandangan/usulannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pimpinan Komisi-Komisi menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pimpinan Komisi I

- Terkait dengan belum diselesaikannya penyusunan RUU Penyiaran, Komisi I tetap meminta agar RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan berkomitmen akan menyelesaikan pada Tahun 2017.
- Untuk penyusunan RUU tentang Radio Televisi Indonesia (RTI) akan diselesaikan juga pada tahun 2017,
- Komisi I juga meminta juga agar RUU tentang Perlindungan Data Pribadi untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, hal ini dikarenakan anggaran untuk pembahasan RUU tersebut sudah masuk dalam anggaran DepKominfo Tahun Anggaran 2017.

2. Pimpinan Komisi II:

- Saat ini Komisi II sedang melakukan Pembahasan beberapa RUU, diantaranya adalah RUU tentang Pertanahan.
- Komisi II mendukung dan mendorong agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat segera diselesaikan.

3. Pimpinan Komisi III : tidak hadir

4. Pimpinan Komisi IV:

- Komisi IV saat ini sedang melakukan pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan yang masuk pada pasal-pasal krusial.
- Komisi IV berkomitmen untuk dapat menyelesaikan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tahun 2017

5. Pimpinan Komisi V : tidak hadir

6. Pimpinan Komisi VI : tidak hadir

7. Pimpinan Komisi VII:

- Terkait dengan belum terselesaikannya penyusunan 2 (dua) RUU di Komisi VII, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Komisi VII akan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah untuk dapat menyelesaikan penyusunan RUU tersebut.
- Untuk itu kiranya kedua RUU tetap dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

8. Pimpinan Komisi VIII:

- Komisi VIII meminta agar RUU yang menjadi tanggung jawab dari Komisi VIII tetap masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 baik yang dalam tahap pembahasan maupun penyusunan.

9. Pimpinan Komisi IX :

- Untuk tahun 2017 yang akan datang, komisi IX akan fokus pada pembahasan RUU tentang PPILN dan penyusunan RUU tentang Kebidanan

10. Pimpinan Komisi X:

- Saat ini Komisi X sedang melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) RUU dan diharapkan akan diselesaikan pada tahun 2017.

11. Pimpinan Komisi XI

- Komisi XI akan memfokuskan untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kiranya kedua RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017;
- Untuk RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pembahasannya harus dilakukan dalam satu paket.,

12. Pimpinan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu baru sampai tahap pemilihan ketua, adapun target penyelesaian RUU ini adalah pada bulan Mei-Juni tahun 2017.

13. Pimpinan Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masih terkendala pada satu DIM yaitu terkait dengan judul dari RUU, kiranya pansus juga berharap dapat segera mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

14. Pimpinan Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- Pembahasan RUU ini tidak mengalami permasalahan yang berarti, kiranya akan diselesaikan sesuai jadwal.

15. Pimpinan Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- Proses pembahasan RUU ini masih dalam mencari masukan-masukan dari stake holder dan masyarakat, dan meminta agar RUU ini tetap masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

B. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Tujuan dari Rakor ini adalah utk menegaskan kembali RUU yang kiranya dapat diselesaikan di tahun 2017, untuk itu Badan Legislasi perlu mengetahui terkait dengan adanya keterlambatan pembahasan di Komisi dan Pansus.
2. Tertundanya suatu pembahasan RUU tidak hanya dikarenakan faktor internal, namun dikarenakan juga lambatnya Surpres yang diberikan oleh presiden, oleh karena itu perlu menjadi perhatian bersama
3. Salah satu kendala dalam penyusunan prolegnas adalah inkonsistensi data terkait dengan adanya NA dan draft RUU, untuk itu perlu penegasan kembali terkait dengan usulan RUU yang akan masuk dalam Prolegnas.

III. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 menyetujui/menyepakati bahwa RUU yang terdapat dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dalam penyusunan dan pembahasan untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB

Jakarta, 29 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001